



*Rudy C Tarumingkeng: Politik Dalam Negeri Indonesia di Era
Konsolidasi: Stabilitas yang Mahal*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudymt75@gmail.com

6 April 2026

POLITIK DALAM NEGERI INDONESIA DI ERA KONSOLIDASI: STABILITAS YANG MAHAL

Abstrak

Makalah ini membahas politik dalam negeri Indonesia pada periode pasca-Pemilu 2024 hingga awal 2026 sebagai sebuah era konsolidasi kekuasaan, yakni fase ketika stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, dan penyatuan elite dijadikan alasan utama untuk memperkuat kapasitas negara. Argumen utama makalah ini adalah bahwa stabilitas yang dibangun melalui koalisi besar, kontrol legislatif yang lebih solid, ekspansi kabinet, sentralisasi agenda fiskal, serta pendekatan keamanan terhadap dissent memang dapat memberi pemerintah ruang gerak yang lebih besar untuk menjalankan program prioritas. Namun, stabilitas semacam itu juga mengandung biaya yang tidak kecil. Biaya tersebut muncul dalam bentuk menyusutnya oposisi efektif di parlemen, menurunnya kualitas pengawasan, meningkatnya kekhawatiran atas intervensi politik dalam hukum, kembalinya peran militer yang lebih luas di ranah sipil, penyempitan ruang kebebasan sipil, serta tekanan fiskal akibat program-program besar yang menuntut efisiensi belanja dan realokasi anggaran. Makalah ini menunjukkan bahwa Indonesia kontemporer tidak sedang bergerak menuju instabilitas klasik, melainkan menuju bentuk stabilitas yang lebih terkonsolidasi namun lebih mahal secara demokratis dan sosial. Dengan memadukan data resmi pemerintah, evaluasi lembaga internasional, dan perkembangan politik mutakhir, makalah ini menegaskan bahwa tantangan utama Indonesia bukan semata menjaga

stabilitas, tetapi memastikan bahwa stabilitas tidak dibeli dengan harga terlalu mahal berupa pelemahan institusi demokrasi, penyeragaman politik, dan pembatasan ruang kritik. ([Reuters](#))

Kata kunci: politik dalam negeri, konsolidasi kekuasaan, stabilitas politik, koalisi besar, ruang sipil, parlemen, Indonesia

Politik Dalam Negeri Indonesia di Era Konsolidasi: Stabilitas yang Mahal

Pendahuluan

Politik dalam negeri Indonesia setelah Pemilu 2024 memperlihatkan satu kecenderungan yang sangat menonjol: negara bergerak ke arah konsolidasi. Konsolidasi di sini tidak semata berarti stabilitas administratif, tetapi juga proses penyatuan dukungan elite, penguatan kendali eksekutif atas agenda pemerintahan, serta pengurangan friksi politik yang dapat menghambat pelaksanaan program. Pada 16 Agustus 2024, Reuters melaporkan bahwa Prabowo Subianto telah mengamankan mayoritas parlemen setelah NasDem bergabung ke dalam koalisi besar pendukungnya, sehingga kekuatan koalisi naik dari 43 persen menjadi 52 persen kursi. Reuters juga menulis bahwa mayoritas ini diperkirakan akan memuluskan proses legislasi, termasuk persetujuan APBN 2025. Dalam pengertian dasar, inilah fondasi awal dari "era konsolidasi" yang dibahas makalah ini. ([Reuters](#))

Konsolidasi itu memperoleh legitimasi normatif dari kebutuhan akan pemerintahan yang kuat. Pada 20 Oktober 2024, saat dilantik sebagai presiden kedelapan Indonesia, Prabowo menyatakan tekad untuk

mengatasi persoalan domestik seperti korupsi dan mendorong Indonesia menjadi lebih swasembada. Sesudah itu, pemerintah menempatkan RPJMN 2025–2029 sebagai fondasi awal menuju Indonesia Emas 2045, dan APBN 2025 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di atas kertas, logika ini sangat masuk akal: negara yang besar, kompleks, dan menghadapi tantangan global memang memerlukan stabilitas politik untuk bergerak. Namun pertanyaannya bukan apakah stabilitas diperlukan, melainkan stabilitas seperti apa yang sedang dibangun, dan siapa yang menanggung biayanya. ([Reuters](#))

Pertanyaan itu menjadi penting karena stabilitas politik Indonesia hari ini berdiri di atas lanskap demokrasi yang tidak sepenuhnya menguat. International IDEA menilai Indonesia berkinerja menengah dalam representasi, hak, dan *rule of law*, serta tinggi dalam partisipasi, tetapi juga mencatat penurunan dibanding lima tahun sebelumnya pada akses keadilan, kredibilitas pemilu, efektivitas parlemen, independensi peradilan, dan kepastian penegakan hukum. Freedom House masih menempatkan Indonesia dalam kategori *Partly Free* dengan skor 56 dari 100 pada 2025, sementara V-Dem Democracy Report 2026 menempatkan Indonesia dalam “autocratic grey zone” dan menyatakan Indonesia diklasifikasikan sebagai *electoral autocracy* sejak 2024. Perbedaan instrumen ini tidak harus dibaca sebagai kontradiksi total; justru ia menunjukkan bahwa di balik permukaan stabilitas, ada kekhawatiran serius mengenai mutu demokrasi. ([International IDEA](#))

Makalah ini berangkat dari tesis bahwa politik dalam negeri Indonesia di era konsolidasi menghasilkan “stabilitas yang mahal”. Mahal dalam arti fiskal, karena program-program besar membutuhkan realokasi sumber daya dan efisiensi yang menimbulkan resistensi. Mahal dalam arti kelembagaan, karena koalisi besar dan kontrol politik yang luas dapat menumpulkan oposisi dan pengawasan. Mahal dalam arti sipil, karena stabilitas sering dijaga dengan pendekatan keamanan terhadap protes dan

kritik. Mahal pula dalam arti hukum, ketika rekonsiliasi elite dan kepentingan politik berpotensi mengintervensi persepsi atas independensi peradilan. Dengan demikian, makalah ini tidak menolak stabilitas sebagai tujuan, tetapi mengajak pembacaan yang lebih kritis terhadap harga yang sedang dibayar untuk mencapainya. ([Kemenkeu Media](#))

Konsolidasi Sebagai Proyek Politik

Dalam studi politik, konsolidasi sering dipahami sebagai upaya membuat kekuasaan lebih ajek, lebih dapat diprediksi, dan lebih mampu menjalankan agenda. Dalam konteks Indonesia pasca-2024, konsolidasi tampak pada setidaknya empat gejala. Pertama, pengamanan mayoritas parlemen oleh presiden terpilih bahkan sebelum pelantikan. Kedua, pembentukan kabinet besar yang secara terbuka dibela sebagai kebutuhan pemerintahan yang kuat. Ketiga, penempatan program-program prioritas dalam desain fiskal nasional. Keempat, kecenderungan meredam atau mengelola konflik melalui kombinasi kooptasi elite, legalitas formal, dan kontrol keamanan. Karena itu, istilah "era konsolidasi" dalam makalah ini tidak dipakai secara netral, melainkan sebagai nama bagi suatu cara mengelola politik domestik. ([Reuters](#))

Prabowo sendiri membela rencana memperbesar pemerintahan sebelum pelantikannya. Reuters pada 10 Oktober 2024 melaporkan bahwa ia mempertahankan rencana menambah sekitar 10 kementerian dan lembaga, dengan alasan bahwa pemerintahan yang kuat memerlukannya, meskipun para pengkritik menilai kabinet gemuk akan membebani birokrasi. Reuters juga mencatat bahwa langkah ini dipandang sebagai cara menyediakan posisi senior bagi politisi dalam koalisi tujuh partai pendukungnya. Di sini terlihat salah satu logika dasar stabilitas: dukungan politik dipelihara tidak hanya melalui ide dan program, tetapi juga melalui distribusi ruang kekuasaan. Stabilitas, dengan kata lain, memerlukan arsitektur patronase dan akomodasi yang tidak kecil. ([Reuters](#))

Di pihak lain, konsolidasi tidak selalu tampil sebagai tindakan keras. Kadang ia hadir dalam bahasa persatuan nasional. Pada 1 Agustus 2025, Reuters melaporkan bahwa Presiden Prabowo memberi pengampunan kepada dua rival politiknya, Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong. Menteri Hukum menyatakan langkah itu diambil demi membangun bangsa bersama seluruh elemen politik dan sebagai bagian dari semangat menjelang Hari Kemerdekaan. Namun, Reuters juga mengutip kekhawatiran para ahli hukum dan aktivis bahwa langkah tersebut dapat dibaca sebagai tawar-menawar politik dan mengirim sinyal bahwa pemerintah dapat mengintervensi penegakan hukum. Karena itu, konsolidasi di Indonesia tidak hanya bekerja melalui dominasi, tetapi juga melalui rekonsiliasi elite yang ambigu. ([Reuters](#))

Dengan demikian, stabilitas di era konsolidasi bukan sekadar keadaan tanpa gejolak. Ia adalah hasil dari desain politik tertentu: menyatukan elite, meminimalkan oposisi, memperkuat eksekutif, dan menata ulang hubungan antara negara, parlemen, dan masyarakat sipil. Persoalannya, desain seperti ini hampir selalu membawa biaya. Semakin luas koalisi, semakin besar risiko menurunnya daya kontrol parlemen. Semakin besar kabinet, semakin tinggi kebutuhan mengakomodasi kepentingan politik di luar rasionalitas teknokratis. Semakin kuat bahasa persatuan, semakin besar godaan untuk melihat perbedaan pendapat sebagai gangguan yang harus diredam. Stabilitas yang dibangun dengan cara ini menjadi efektif, tetapi sekaligus mahal. ([Reuters](#))

Mengapa Stabilitas Dicari?

Pemerintah Indonesia memiliki argumen yang cukup kuat mengapa stabilitas harus diprioritaskan. Dokumen resmi APBN 2025 menyatakan bahwa di tengah ketidakpastian global dan dinamika domestik, APBN tetap diandalkan sebagai *shock absorber* agar daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Pada dokumen yang sama, belanja negara 2025 dialokasikan sebesar Rp3.621,3 triliun, terdiri

dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah Rp919,9 triliun. Dokumen itu juga menegaskan bahwa belanja negara diarahkan untuk efisiensi belanja non-prioritas, penguatan belanja modal, reformasi subsidi dan perlindungan sosial, serta sinergi pusat-daerah. Dari sini tampak bahwa pemerintah melihat stabilitas politik sebagai prasyarat agar mesin fiskal dapat dijalankan secara disiplin dan terarah. ([Kemenkeu Media](#))

RPJMN 2025–2029 memberi konteks yang lebih luas lagi. Sekretariat Negara menjelaskan bahwa Perpres No. 12 Tahun 2025 menjadikan RPJMN 2025–2029 sebagai implementasi tahap pertama RPJPN 2025–2045 dan fondasi awal menuju Indonesia Emas 2045. Stabilitas dengan demikian dikaitkan dengan horizon jangka panjang, bukan hanya pengelolaan harian pemerintahan. Negara perlu stabil agar mampu melakukan transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan-energi-air, dan peningkatan kualitas SDM. Dalam logika ini, konsolidasi politik bukan sekadar manuver elite, tetapi sarana untuk memastikan bahwa proyek pembangunan tidak terganggu oleh fragmentasi politik yang berkepanjangan. ([Setneg](#))

Selain itu, stabilitas juga dicari untuk menjaga persepsi pasar dan investor. Reuters melaporkan bahwa gelombang protes besar pada Agustus 2025 mengguncang kepercayaan investor, memukul rupiah dan pasar saham, dan memaksa Prabowo membatalkan lawatan luar negeri pentingnya ke China. Ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi terbuka seperti Indonesia, instabilitas domestik dengan cepat memiliki konsekuensi finansial. Dari sudut pandang pemerintah, maka, meminimalkan konflik dan menjaga keteraturan politik bukan semata obsesi kekuasaan, tetapi juga kebutuhan untuk merawat kredibilitas ekonomi negara. Di sinilah stabilitas memperoleh justifikasi yang sangat kuat dalam bahasa kebijakan. ([Reuters](#))

Akan tetapi, justifikasi yang kuat tidak berarti metode yang dipilih bebas dari masalah. Justru karena stabilitas diasosiasikan dengan pembangunan,

pertumbuhan, dan kredibilitas, pemerintah memiliki insentif besar untuk memperluas cara-cara mempertahankannya. Di titik inilah stabilitas bisa bergeser dari kebutuhan negara menjadi proyek konsolidasi kekuasaan. Ketika keberhasilan pemerintahan didefinisikan terutama sebagai kelancaran eksekusi, maka kritik, oposisi, dan keterlambatan deliberatif mudah dilihat sebagai hambatan. Sejarah politik modern menunjukkan bahwa banyak rezim tidak jatuh karena terlalu menekankan stabilitas, tetapi karena menganggap stabilitas lebih penting daripada kualitas institusi yang menopangnya. ([International IDEA](#))

Wajah Pertama Biaya: Koalisi Besar dan Menipisnya Oposisi

Salah satu biaya paling awal dari era konsolidasi adalah menipisnya oposisi efektif. Reuters pada Agustus 2024 menulis bahwa bergabungnya NasDem ke kubu Prabowo memberi pemerintahan baru kendali mayoritas atas parlemen. Mayoritas seperti ini memang memudahkan legislasi dan pengesahan anggaran. Namun dalam demokrasi, kemudahan legislatif tidak selalu identik dengan kualitas pemerintahan. Ketika oposisi semakin kecil, fungsi koreksi politik cenderung berpindah dari parlemen ke jalanan, media, organisasi masyarakat sipil, dan pengadilan. Dengan kata lain, semakin stabil parlemen secara koalisi, semakin besar risiko ketidakstabilan muncul di luar parlemen. ([Reuters](#))

International IDEA menangkap gejala ini ketika menyebut bahwa Indonesia mengalami penurunan pada indikator *effective parliament*. Penilaian ini tidak berarti parlemen berhenti bekerja, melainkan bahwa efektivitasnya sebagai lembaga representasi, pengawasan, dan penyeimbang memburuk dibanding lima tahun sebelumnya. Dalam konteks koalisi besar, penurunan ini mudah dipahami. Parlemen yang terlalu didominasi kubu pemerintah cenderung lebih cepat menjadi arena ratifikasi ketimbang arena deliberasi. Ia mampu menghasilkan keputusan dengan cepat, tetapi daya korektifnya berkurang. Inilah stabilitas yang mahal di tingkat kelembagaan: konflik dipangkas, tetapi kualitas perdebatan ikut menipis. ([International IDEA](#))

Contoh jelasnya tampak dalam revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025. Reuters melaporkan bahwa parlemen meloloskan perubahan yang memperluas jabatan sipil yang dapat diisi perwira militer aktif, meskipun ratusan mahasiswa dan aktivis memprotes di luar gedung DPR. Dari perspektif koalisi kekuasaan, ini menunjukkan efektivitas: agenda yang dianggap penting pemerintah dapat diproses tanpa hambatan berarti. Dari perspektif demokrasi, ini menunjukkan biaya: parlemen tampak lebih responsif terhadap preferensi elite negara dibandingkan terhadap kegelisahan publik. Semakin dominan koalisi besar, semakin kecil kemungkinan parlemen berubah pikiran hanya karena penolakan masyarakat. ([Reuters](#))

Biaya lain dari koalisi besar adalah menguatnya politik akomodasi jabatan. Kabinet besar yang dibela sebagai kebutuhan pemerintahan kuat dapat juga dibaca sebagai mekanisme distribusi posisi untuk menjaga loyalitas elite. Logika ini tidak selalu salah secara praktis; banyak pemerintahan memang membutuhkan koalisi luas untuk stabil. Tetapi jika terlalu jauh, ia menambah beban birokrasi, memperkuat insentif transaksional, dan membuat kebijakan publik harus terus bernegosiasi dengan kebutuhan mempertahankan koalisi. Dalam jangka panjang, ini menghasilkan bentuk stabilitas yang mahal secara administratif dan politik. ([Reuters](#))

Wajah Kedua Biaya: Hukum, Pengampunan Politik, dan Ambiguitas Rule of Law

Biaya berikutnya muncul pada ranah hukum dan persepsi atas independensi peradilan. Indonesia memang masih memiliki kanal korektif kelembagaan. International IDEA mencatat bahwa pada 17 April 2025 Mahkamah Konstitusi menyatakan tiga bagian dari KUHP 1946 yang mengkriminalkan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik bertentangan dengan konstitusi, dan para pembela kebebasan berekspresi menyambutnya sebagai kemenangan kecil namun penting. Putusan ini menunjukkan bahwa tidak semua institusi negara larut dalam logika

konsolidasi; masih ada ruang koreksi dari dalam sistem. Tetapi fakta bahwa kemenangan semacam ini dipandang “kecil namun penting” justru menandakan bahwa konteks umumnya sedang tidak sehat. ([International IDEA](#))

Ambiguitas yang lebih besar terlihat dalam keputusan presiden memberi pengampunan kepada dua lawan politik pada Agustus 2025. Secara resmi, keputusan itu dibingkai sebagai upaya menyatukan bangsa dan merangkul seluruh elemen politik. Namun Reuters juga mengutip pandangan ahli hukum yang menyebut langkah itu “political”, baik untuk mencari dukungan dari partai oposisi terbesar di parlemen maupun untuk merespons protes publik atas salah satu vonis. Hak prerogatif presiden memang sah secara hukum dengan persetujuan parlemen. Tetapi ketika digunakan dalam konteks politik yang sangat cair, ia dapat dibaca sebagai tanda bahwa stabilitas dibeli melalui intervensi atas ritme hukum. Rule of law tidak hilang, tetapi menjadi tampak mudah dinegosiasikan. ([Reuters](#))

International IDEA pada Agustus 2025 bahkan mencatat bahwa para pakar antikorupsi dan hukum memandang pengampunan itu sebagai bukti intervensi yang berlebihan terhadap lembaga peradilan, karena kedua perkara belum menempuh seluruh jalur banding. Apa pun posisi normatif kita terhadap amnesti atau abolisi, yang jelas keputusan tersebut memperlihatkan pola penting era konsolidasi: konflik elite tidak selalu diselesaikan oleh mekanisme hukum biasa, tetapi dapat dimoderasi oleh keputusan politik demi menjaga persatuan. Ini menciptakan stabilitas jangka pendek, tetapi dengan harga berupa bertambahnya keraguan publik terhadap konsistensi penegakan hukum. ([International IDEA](#))

Di level lebih luas, penilaian Freedom House dan IDEA mengenai menurunnya independensi peradilan dan kepastian penegakan hukum memberi latar yang lebih serius terhadap kasus-kasus tersebut. Jika persepsi publik berkembang bahwa hukum dapat ditekuk atau dipercepat sesuai kebutuhan konsolidasi, maka stabilitas yang tercipta menjadi rapuh

secara normatif. Ia stabil karena elite sepakat, bukan karena publik percaya pada keadilan institusi. Stabilitas seperti ini bisa bertahan dalam jangka menengah, tetapi selalu membawa akumulasi kekecewaan yang berbahaya. ([International IDEA](#))

Wajah Ketiga Biaya: Kembalinya Militer ke Ruang Sipil

Biaya lain yang sangat besar adalah kembalinya militer lebih jauh ke dalam ruang sipil. Reuters pada Maret 2025 melaporkan bahwa revisi UU TNI mengalokasikan lebih banyak jabatan sipil bagi perwira militer aktif, dan kelompok masyarakat sipil menilai perubahan tersebut berisiko membawa Indonesia kembali ke era New Order, ketika militer mendominasi urusan sipil. Dalam narasi resmi, langkah ini bisa dijustifikasi sebagai penyesuaian kebutuhan negara, keamanan, dan koordinasi kelembagaan. Tetapi dalam pengalaman historis Indonesia, perluasan peran militer di ranah sipil selalu memanggil memori tentang merosotnya supremasi sipil. Karena itu, stabilitas yang dibangun melalui kedekatan lebih besar antara negara sipil dan institusi militer jelas memiliki harga demokratis yang tinggi. ([Reuters](#))

International IDEA juga memberi peringatan yang sejalan. Pada profil Indonesia, lembaga itu menyebut "return of the military to politics" sebagai salah satu faktor yang perlu diawasi dalam beberapa tahun ke depan, khususnya terkait faktor-faktor *rule of law* dan independensi yudisial. Sinyal ini penting karena memperlihatkan bahwa kembalinya militer bukan dibaca sebagai penyesuaian administratif semata, melainkan sebagai gejala yang dapat memengaruhi keseluruhan kualitas demokrasi. Ketika logika keamanan masuk lebih jauh ke arena sipil, maka politik dalam negeri cenderung bergerak dari kompromi menuju disiplin, dari deliberasi menuju command, dan dari perdebatan menuju kontrol. ([International IDEA](#))

Biaya itu tidak hanya bersifat simbolik. CIVICUS pada Juli 2025 secara eksplisit mengaitkan revisi hukum militer dengan kekerasan aparat terhadap demonstrasi. Menurut rilis Watchlist mereka, pada Maret 2025

polisi dan unit militer secara keras membubarkan demonstrasi publik yang menentang revisi UU militer, memperluas pengaruh militer atas kehidupan sipil dan melemahkan pengawasan. Rilis itu juga mencatat bahwa jurnalis dipaksa menghapus rekaman kekerasan polisi. Sekali lagi, stabilitas dalam bahasa negara adalah ketertiban; tetapi dalam pengalaman warga, ketertiban seperti itu dapat terasa sebagai penutupan ruang. ([Civics Monitor](#))

Dengan demikian, konsolidasi yang bertumpu pada peran keamanan yang lebih besar memang dapat mengurangi risiko pembangkangan terbuka. Namun ia juga menambah beban panjang bagi demokrasi Indonesia, karena ia mengikis jarak yang dengan susah payah dibangun sejak Reformasi antara militer dan politik sipil. Stabilitas bisa tercapai, tetapi dengan harga yang menyentuh salah satu pelajaran paling mendasar dari sejarah Indonesia modern. ([Reuters](#))

Wajah Keempat Biaya: Penyempitan Ruang Sipil

Salah satu harga paling nyata dari stabilitas adalah menyempitnya ruang sipil. Freedom House pada 2025 menyebut bahwa Indonesia masih memiliki pluralisme politik dan media, tetapi menghadapi tantangan besar berupa korupsi sistemik, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, konflik di Papua, serta penggunaan politis hukum pencemaran nama baik dan penodaan agama. CIVICUS melangkah lebih jauh dengan menempatkan Indonesia dalam Watchlist 2025, menyebut ruang sipil Indonesia "obstructed", dan menilai bahwa sembilan bulan pertama pemerintahan Prabowo ditandai oleh intimidasi negara yang meluas, manipulasi hukum, dan penindakan keras terhadap dissent. ([Freedom House](#))

Rilis CIVICUS bahkan merinci bahwa dalam enam bulan pertama 2025 lebih dari 100 pembela HAM mengalami penangkapan, kriminalisasi, intimidasi, atau serangan fisik menurut laporan masyarakat sipil. Mereka menyebut korban ini meliputi aktivis agraria-lingkungan, organisator mahasiswa,

akademisi, pegiat buruh, dan aktivis antikorupsi. Rilis itu juga menyebut adanya intimidasi terhadap KontraS dan jurnalis independen, termasuk doxxing dan ancaman. Walaupun angka semacam ini datang dari ekosistem advokasi dan perlu dibaca sebagai data pemantauan sipil, bukan statistik resmi negara, ia tetap penting sebagai indikator bahwa bagi banyak pelaku masyarakat sipil, stabilitas politik tidak dirasakan sebagai rasa aman, melainkan sebagai tekanan. ([Civicus Monitor](#))

Biaya ini tampak jelas dalam cara negara merespons demonstrasi. Reuters pada 20 Februari 2025 melaporkan ribuan mahasiswa turun dalam aksi "Indonesia Gelap" karena khawatir pemotongan anggaran akan merusak sistem dukungan sosial dan masa depan mereka. Keesokan harinya, Reuters mencatat bahwa protes itu meluas ke berbagai kota dan menyoroti kritik terhadap pemotongan sekitar 19 miliar dolar AS, kekhawatiran kenaikan biaya kuliah, peran militer di ruang sipil, serta masalah gas subsidi. Ketika keresahan atas kebijakan fiskal dan sosial segera berkembang menjadi protes nasional, hal itu menunjukkan bahwa stabilitas formal pemerintahan tidak otomatis berbanding lurus dengan ketenangan sosial. ([Reuters](#))

Yang lebih serius lagi terjadi pada gelombang protes Agustus 2025. Reuters melaporkan bahwa demonstrasi terhadap tunjangan dan fasilitas anggota parlemen berkembang menjadi kerusuhan, menyebabkan sedikitnya lima orang tewas menurut laporan awal pada 31 Agustus 2025. Pada 6 Maret 2026, Reuters memperbarui gambaran itu dengan menyebut bahwa kerusuhan berlanjut hingga September, menyebabkan 10 kematian, hampir 7.000 penangkapan hingga Februari 2026, sekitar 500 orang dijatuhi hukuman, dan 125 orang masih ditahan. Di sini stabilitas menampakkan harganya yang paling telanjang: untuk mempertahankan keteraturan politik, negara dan masyarakat sama-sama membayar dengan eskalasi kekerasan dan penyempitan hak protes. ([Reuters](#))

Wajah Kelima Biaya: Fiskal dan Realokasi Prioritas

Stabilitas di era konsolidasi juga mahal dalam arti fiskal. APBN 2025 memang dirancang besar dan fleksibel, tetapi fleksibilitas itu punya konsekuensi. Reuters pada Februari 2025 melaporkan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan penghematan anggaran senilai sekitar 19 miliar dolar AS untuk membiayai kebijakannya, termasuk program makan bergizi gratis. Dokumen resmi APBN 2025 dan pemberitaan Kementerian Keuangan sebelumnya menyebut bahwa program makan bergizi gratis telah ditampung sebesar Rp71 triliun dalam anggaran 2025. Secara politik, program ini penting karena merupakan janji kampanye utama. Secara fiskal, program itu menuntut prioritas ulang yang memengaruhi sektor-sektor lain dan memicu reaksi. ([Reuters](#))

Di sinilah stabilitas menjadi mahal: untuk menjaga legitimasi politik melalui program unggulan, negara harus meminta birokrasi dan masyarakat menanggung efisiensi yang tidak selalu populer. Demonstrasi “Indonesia Gelap” lahir dari kecemasan bahwa pemotongan anggaran akan memukul pendidikan, kesejahteraan guru, dan biaya hidup mahasiswa. Reuters bahkan mencatat bahwa tren “Just Escape First” beredar di media sosial sebagai simbol keputusasaan sebagian anak muda. Ini berarti biaya fiskal stabilitas tidak berhenti di angka-angka APBN; ia menjalar ke psikologi sosial, persepsi masa depan, dan rasa keadilan antargenerasi. ([Reuters](#))

Pada Agustus 2025, Reuters juga melaporkan bahwa pemotongan anggaran daerah diperkirakan mendorong kenaikan pajak lokal dan memicu kemarahan publik lebih lanjut. Jika dinamika ini dibaca bersama, terlihat bahwa konsolidasi fiskal demi program prioritas nasional dapat menggeser tekanan ke level daerah dan masyarakat. Dalam jangka pendek, pemerintah pusat mungkin memperoleh ruang fiskal untuk menjalankan agenda besar. Dalam jangka menengah, biaya sosialnya dapat muncul sebagai frustrasi lokal, kenaikan pungutan, dan memburuknya kepercayaan terhadap prioritas negara. Stabilitas fiskal yang dipaksakan dari atas bisa dengan cepat berubah menjadi instabilitas sosial dari bawah. ([Reuters](#))

Stabilitas juga mahal karena program prioritas itu sendiri kemudian harus dijaga secara politik. Reuters pada 2 September 2025 menulis bahwa rancangan anggaran menunjukkan kenaikan 37 persen pada belanja pertahanan dan hampir dua kali lipat pembiayaan untuk program makan gratis menjadi sekitar 20,5 miliar dolar AS. Jika angka-angka seperti ini terus mendorong realokasi besar, maka politik anggaran Indonesia akan semakin menjadi arena konflik domestik utama. Negara membutuhkan stabilitas untuk menjalankan program; tetapi program itu sendiri bisa menjadi sumber instabilitas bila warga menganggap manfaat dan bebannya tidak dibagi secara adil. ([Reuters](#))

Stabilitas dan Krisis Representasi

Salah satu cara terbaik membaca “stabilitas yang mahal” adalah dengan melihat bagaimana protes 2025 bukan hanya menolak satu kebijakan, tetapi mengekspresikan krisis representasi yang lebih dalam. Reuters pada 31 Agustus 2025 menulis bahwa kelompok mahasiswa menilai pemotongan tunjangan anggota parlemen “tidak cukup” dan menuntut penyelesaian masalah-masalah yang lebih mendasar. Kalimat ini penting. Ia menunjukkan bahwa kemarahan publik bukan semata soal nominal tunjangan, melainkan soal kesan bahwa elite politik hidup dalam dunia insentif yang berbeda dari warga biasa. Dengan demikian, stabilitas formal yang berhasil dijaga di tingkat elite justru berdampingan dengan retaknya legitimasi representasi di tingkat masyarakat. ([Reuters](#))

Krisis representasi juga menjelaskan mengapa jalanan menjadi arena koreksi yang begitu penting. Ketika koalisi besar membuat oposisi parlemen kurang efektif, kritik berpindah ke mahasiswa, organisasi sipil, media, dan jalanan. Akibatnya, stabilitas di gedung parlemen tidak selalu berarti stabilitas dalam masyarakat. Sebaliknya, ia kadang justru memindahkan konflik ke arena yang lebih sulit dikendalikan. Inilah paradoks besar era konsolidasi Indonesia: semakin berhasil elite menyatukan diri, semakin besar risiko warga merasa tidak memiliki cukup

kanal representasi formal. Harga dari ketenangan elite adalah kegaduhan sosial di luar institusi. ([Reuters](#))

International IDEA dan Freedom House memberikan kerangka yang cocok untuk membaca situasi ini. IDEA menunjukkan partisipasi Indonesia tetap tinggi, sementara efektivitas parlemen dan kepastian penegakan hukum menurun. Freedom House menunjukkan Indonesia masih memiliki pluralisme, tetapi tantangan kebebasan sipil dan korupsi tetap besar. Dua evaluasi ini bila digabungkan memberi kesimpulan penting: Indonesia tidak kekurangan energi politik warga; yang sedang bermasalah adalah kapasitas institusinya untuk mengolah energi itu secara adil. Stabilitas yang mahal lahir justru dari upaya menutupi masalah representasi dengan konsolidasi kekuasaan, alih-alih menyelesaikan akar persoalannya. ([International IDEA](#))

Apakah Stabilitas Tidak Punya Sisi Positif?

Pembacaan yang adil tetap harus mengakui bahwa stabilitas memiliki nilai positif. Negara kepulauan besar seperti Indonesia memang sulit dikelola bila elite politik terus terpecah tajam. Mayoritas parlemen dapat mempercepat legislasi, APBN yang kuat dapat menjadi *shock absorber*, dan kabinet yang relatif solid dapat memudahkan koordinasi lintas kementerian. Dalam sistem politik yang sebelumnya sering ditandai fragmentasi dan transaksi antar-elite yang volatil, konsolidasi dapat memberi ruang bagi kebijakan jangka menengah yang lebih terencana. Argumen inilah yang membuat bahasa persatuan, kolaborasi, dan optimisme begitu menonjol dalam pernyataan elite pendukung pemerintahan baru. ([Reuters](#))

Selain itu, sebagian koreksi institusional masih bekerja. Putusan Mahkamah Konstitusi pada April 2025 yang membatalkan beberapa ketentuan pidana tentang berita bohong dan pencemaran nama baik menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya tertutup terhadap koreksi hukum. Begitu pula pembebasan empat aktivis pada Maret 2026, yang oleh Reuters dan

kelompok hak asasi disebut sebagai kemenangan kecil bagi kebebasan sipil, menunjukkan bahwa ruang perlawanan hukum masih ada. Karena itu, stabilitas Indonesia hari ini belum jatuh menjadi penutupan total ruang demokrasi; ia lebih tepat dipahami sebagai stabilitas yang mempersempit, tetapi belum menghapus seluruh kanal koreksi. ([International IDEA](#))

Justru karena itulah pembahasan tentang “stabilitas yang mahal” perlu nuansa. Masalahnya bukan bahwa negara sedang stabil, melainkan bahwa stabilitas yang dipilih terlalu bertumpu pada logika konsolidasi dari atas. Bila stabilitas bisa dipertahankan sambil tetap menjaga oposisi efektif, independensi hukum, dan kebebasan sipil, maka ia akan menjadi aset demokrasi. Tetapi jika stabilitas hanya mungkin dicapai dengan menipiskan pengawasan, memperluas militerisasi sipil, dan menekan ruang kritik, maka ia berubah menjadi liabilitas jangka panjang. Indonesia saat ini tampaknya berada di antara dua kemungkinan itu. ([International IDEA](#))

Agenda Pembenahan: Menurunkan Harga Stabilitas

Pertama, Indonesia memerlukan konsolidasi yang tidak mematikan oposisi. Koalisi besar boleh saja ada, tetapi parlemen harus tetap dijaga sebagai arena pengawasan, bukan sekadar ratifikasi. Ini memerlukan penguatan komite-komite pengawasan, keterbukaan legislasi, dan keterlibatan publik yang lebih nyata. Jika parlemen terlalu nyaman sebagai perpanjangan eksekutif, maka kritik akan terus meledak di luar institusi. Stabilitas yang sehat justru menuntut adanya ketegangan yang produktif di dalam lembaga, bukan hanya keseragaman suara. (dpr.go.id)

Kedua, pemerintah perlu membangun disiplin fiskal yang lebih komunikatif dan adil. Program besar seperti makan bergizi gratis mungkin memiliki legitimasi politik yang kuat, tetapi pembiayaannya tidak boleh menghasilkan kesan bahwa negara hanya memindahkan beban ke kampus, daerah, atau kelompok rentan. Efisiensi tanpa kejelasan prioritas sosial akan memicu resistensi berkepanjangan. Karena itu, APBN harus bukan

hanya kredibel bagi pasar, tetapi juga dapat dipahami dan diterima sebagai adil oleh warga. ([Kemenkeu Media](#))

Ketiga, reformasi hukum dan kebebasan sipil harus dipandang sebagai bagian dari stabilitas, bukan hambatan bagi stabilitas. Keputusan presiden yang terlalu mudah dibaca sebagai tawar-menawar hukum, revisi aturan yang terburu-buru, dan kekerasan aparat terhadap protes justru menambah biaya politik dalam jangka menengah. Negara yang stabil bukan negara yang paling cepat menertibkan kritik, melainkan negara yang paling mampu menerima kritik tanpa kehilangan wibawa. Putusan Mahkamah Konstitusi dan pembebasan aktivis dapat dibaca sebagai titik-titik kecil yang menunjukkan arah pembenahan ini masih mungkin. ([Reuters](#))

Keempat, Indonesia perlu menegaskan kembali supremasi sipil. Revisi peran militer di ruang sipil mungkin tampak efisien dalam jangka pendek, tetapi secara historis membawa beban normatif yang sangat berat. Stabilitas demokratis harus dibangun di atas birokrasi sipil yang kuat, kepolisian yang akuntabel, dan institusi pertahanan yang tetap berada dalam orbit kontrol sipil yang tegas. Tanpa itu, stabilitas akan makin mahal karena harus terus dipertahankan dengan sumber daya koersif, bukan dengan legitimasi. ([Reuters](#))

Penutup

Politik dalam negeri Indonesia di era konsolidasi menunjukkan kenyataan yang paradoks. Negara tampak lebih stabil secara elite, lebih rapi secara koalisi, dan lebih kuat secara kapasitas menjalankan agenda prioritas. Mayoritas parlemen, kabinet yang diperluas, RPJMN 2025–2029, dan APBN 2025 semuanya memperlihatkan bahwa pemerintahan sekarang memang memiliki ruang gerak yang besar. Dalam masyarakat yang lama terbiasa dengan fragmentasi, situasi ini mudah dibaca sebagai kemajuan. Tetapi

makalah ini menunjukkan bahwa stabilitas tersebut datang dengan biaya yang tidak kecil. ([Reuters](#))

Biaya itu muncul dalam banyak bentuk: oposisi efektif yang menipis, pengawasan parlemen yang berisiko melemah, intervensi politik yang membayangi persepsi atas hukum, meluasnya peran militer dalam ruang sipil, menyempitnya kebebasan sipil, serta ketegangan sosial yang lahir dari efisiensi fiskal dan prioritas anggaran. Protes “Indonesia Gelap”, polemik revisi UU TNI, gelombang demonstrasi Agustus 2025, hingga pembebasan aktivis pada Maret 2026 semuanya menunjukkan bahwa di balik ketertiban elite ada kegelisahan sipil yang sangat nyata. Stabilitas itu ada, tetapi ia mahal karena sebagian biayanya dibayar oleh kualitas demokrasi dan kepercayaan publik. ([Reuters](#))

Karena itu, pertanyaan untuk Indonesia ke depan bukan apakah stabilitas harus dijaga. Jawabannya jelas: ya. Pertanyaannya ialah apakah stabilitas itu akan terus dibangun melalui konsolidasi dari atas yang mahal, ataukah Indonesia mampu menggesernya menjadi stabilitas yang lebih demokratis—stabilitas yang tetap memberi ruang pada oposisi, hukum yang lebih otonom, parlemen yang lebih efektif, dan kebebasan sipil yang lebih aman. Bila pilihan kedua gagal dibangun, maka stabilitas Indonesia akan terus ada, tetapi semakin mahal dari tahun ke tahun. ([International IDEA](#))

Glosarium

Era konsolidasi: fase politik ketika stabilitas, penyatuan elite, dan penguatan kapasitas pemerintah diprioritaskan untuk mempercepat pelaksanaan agenda negara.

Koalisi besar: konfigurasi dukungan partai yang memberi pemerintah mayoritas kuat di parlemen, sehingga memudahkan legislasi dan pengesahan anggaran. ([Reuters](#))

Stabilitas politik: kondisi keteraturan dan kemampuan pemerintahan menjalankan agenda tanpa gangguan besar dari konflik elite atau ketidakpastian kebijakan.

Stabilitas yang mahal: keadaan ketika stabilitas berhasil dibangun, tetapi dengan biaya tinggi pada kualitas demokrasi, kebebasan sipil, rule of law, atau keadilan fiskal.

Rule of law: prinsip bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum yang konsisten, dapat diprediksi, dan tidak tunduk pada tawar-menawar politik jangka pendek. ([International IDEA](#))

Ruang sipil: arena tempat warga, organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan akademisi dapat mengekspresikan pendapat, berkumpul, dan mengawasi negara. ([Civicus Monitor](#))

Supremasi sipil: prinsip bahwa institusi sipil memegang kendali utama atas kebijakan publik dan institusi militer berada di bawah kontrol demokratis.

Shock absorber: fungsi APBN untuk menyerap guncangan ekonomi dan menjaga daya beli serta pertumbuhan ketika situasi global dan domestik bergejolak. ([Kemenkeu Media](#))

Referensi (APA 7)

Freedom House. (2025). *Freedom in the World 2025: Indonesia country report*. ([Freedom House](#))

International IDEA. (2025). *Indonesia country profile: The Global State of Democracy*. ([International IDEA](#))

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, 7 Maret). *RPJMN 2025–2029: Fondasi awal wujudkan visi Indonesia Emas 2045*. ([Setneg](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Informasi APBN Tahun Anggaran 2025*. ([Kemenkeu Media](#))

Reuters. (2024, 16 Agustus). *Indonesia's president-elect Prabowo secures parliamentary majority*. ([Reuters](#))

Reuters. (2024, 10 Oktober). *Indonesia's Prabowo defends plan to expand government with "fat" cabinet*. ([Reuters](#))

Reuters. (2024, 20 Oktober). *Prabowo becomes Indonesia's eighth president, vows to tackle corruption*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, 20 Februari). *Students lead "Dark Indonesia" protests against budget cuts*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, 21 Februari). *Protesters extend "Dark Indonesia" rally against Prabowo's policies*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, 20 Maret). *Indonesia parliament passes contentious amendments to military law*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, 1 Agustus). *Indonesian President Prabowo pardons political opponents*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, 31 Agustus). *Deadly Indonesia protests force U-turn on lawmakers' perks*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, 22 Agustus). *Indonesia's regional budget cuts set to spur more local tax hikes and public outrage*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, 2 September). *Explainer: What's fuelling the rage in Indonesia?* ([Reuters](#))

Reuters. (2026, 6 Maret). *Indonesian court acquits four activists accused of inciting deadly 2025 student protests*. ([Reuters](#))

V-Dem Institute. (2026). *Democracy Report 2026: Unraveling the Democratic Era?* ([V-Dem](#))

CIVICUS Monitor. (2025, 30 Juli). *Indonesia Watchlist 2025*. ([Civics Monitor](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 6 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))
<https://chatgpt.com/c/69d37f65-3640-839d-822b-a5e109ffd3e1>